

## RINGKASAN

Skripsi ini bertujuan untuk membahas hubungan antara hak politik warga negara dan prinsip netralitas yang harus dipegang teguh oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN adalah pegawai Negara yang mempunyai aturan dan ketentuan dalam penggunaan hak politiknya, namun di sisi lain ASN juga sebagai warga Negara yang mempunyai hak politik yang melekat. Metodologi dalam riset ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Studi Pustaka dalam bingkai perspektif *citizenship theory*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat keseimbangan yang perlu di jaga antara hak politik warga negara dan netralitas ASN. Dalam *citizenship theory*, terdapat penekanan pada hak-hak dan kewajiban warga negara serta bagaimana partisipasi politik dapat membentuk identitas dan integrasi sosial. Namun, ASN juga diharapkan menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk memastikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif. Pemerintah perlu mengembangkan pedoman yang jelas untuk mengatur aktivitas politik ASN, memastikan bahwa hak politik warga negara dihormati sambil tetap menjaga netralitas dan integritas ASN. Kesadaran akan pentingnya netralitas ASN dan edukasi kepada ASN tentang batasan-batasan yang perlu diikuti dalam aktivitas politik juga menjadi faktor penting dalam menjaga harmoni antara kedua prinsip ini.

**Kata Kunci:** kewarganegaraan, netralitas ASN, hak politik

## **SUMMARY**

*This Research aims to discuss the relationship between citizens' political rights and the principle of neutrality which must be adhered to by the Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN are State employees who have rules and regulations for exercising their political rights, but on the other hand ASN are also citizens who have inherent political rights. The methodology in this research uses qualitative methods and a literature study approach within the framework of a citizenship theory perspective. The research results reveal that there is a balance that needs to be maintained between the political rights of citizens and the neutrality of ASN. In citizenship theory, there is an emphasis on the rights and obligations of citizens and how political participation can shape identity and social integration. However, ASN is also expected to maintain neutrality in carrying out government duties to ensure fair and non-discriminatory services. The government needs to develop clear guidelines to regulate ASN political activities, ensuring that citizens' political rights are respected while maintaining the neutrality and integrity of ASN. Awareness of the importance of ASN neutrality and educating ASN about the boundaries that need to be followed in political activities are also important factors in maintaining harmony between these two principles.*

**keywords:** *citizenship, ASN neutrality, political rights*